



BAB ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Implementasi pembangunan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung keterwujudan visi dan misi pemerintah telah menemui berbagai permasalahan pembangunan. Secara konseptual yang dimaksud dengan permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena beberapa hal yang meliputi:

1. Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal;
2. Kelemahan yang tidak diatasi;
3. Peluang yang tidak dimanfaatkan; dan
4. Ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Secara terperinci permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar meliputi:

4.1.1. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Secara administratif Kabupaten Blitar memiliki wilayah seluas 1.588,79 km², yang terbagi kedalam 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan. Kecamatan Wonotirto merupakan kecamatan yang memiliki wilayah administratif terluas yaitu 164,54 km², disusul oleh Kecamatan Panggungrejo dengan luas wilayah 119,04 km², Kecamatan Bakung dengan luas wilayah 111,24 km², Kecamatan Kademangan dengan luas 105,28 km² dan Kecamatan Ponggok dengan luas wilayah 103,83 km². Namun demikian, terdapat pula 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas wilayah administratif paling sempit yaitu Kecamatan Sanankulon dengan luas wilayah 33,33 km², Kecamatan Selopuro dengan luas wilayah 39,29 km² dan Kecamatan Sutojayan dengan luas wilayah 44,2 km².

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar telah menunjukkan adanya peningkatan. Secara terperinci jumlah penduduk Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015



adalah 1.118.919 jiwa tahun 2010, 1.124.775 jiwa tahun 2011, 1.130.423 jiwa tahun 2012, 1.136.701 jiwa tahun 2013, 1.140.793 jiwa pada tahun 2014 dan 1.145.396 jiwa pada tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blitar tersebut termasuk dalam kategori ideal karena laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,51 persen.

Secara umum, persebaran penduduk Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di wilayah tengah yaitu Kecamatan Sanankulon, Kanigoro, Talun, Srengat, dan Garum, sehingga kelima kecamatan tersebut menduduki lima besar kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kelima wilayah tersebut secara geografis memiliki kemudahan akses terhadap sarana transportasi, komunikasi maupun sarana lainnya karena keberadaannya di perbatasan Kota Blitar yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar sampai saat ini.

Sedangkan kecamatan yang berkepadatan rendah masih didominasi oleh kecamatan yang berada di wilayah selatan diantaranya Wonotirto, Bakung, Pangungrejo dan Wates. Kecamatan Wonotirto merupakan kecamatan terluas yang mencakup 10 persen lebih dari luas wilayah Kabupaten Blitar, hanya memiliki kepadatan penduduk 216 jiwa/km². Sementara, Kecamatan Bakung yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 25.542 jiwa memiliki kepadatan terendah kedua sebesar 230 jiwa/km².

Adapun proporsi penduduk Kabupaten Blitar apabila dilihat berdasarkan perspektif golongan usia masih didominasi oleh usia 15-64 tahun yang disebut sebagai usia produktif dengan persentase sebesar 66,62 persen, sedangkan 33,38 persen sisanya merupakan penduduk usia ≥ 65 tahun dan usia ≤ 15 tahun yang termasuk dalam kategori usia non produktif. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk di Kabupaten Blitar sebesar 50%, artinya setiap 100 orang usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 50 orang non produktif.

Kondisi geografis dan demografis tersebut diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar secara administratif memiliki cakupan wilayah yang luas, dengan angka kepadatan penduduk masuk dalam kategori sangat padat. Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi antara daerah satu dengan daerah lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, transportasi, dan perkembangan pembangunan. Meskipun demikian, apabila dilihat berdasarkan perspektif peningkatan penduduk setiap tahunnya, Kabupaten Blitar termasuk ke dalam kategori daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk ideal yaitu sebesar 0,49. Maksudnya adalah laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar tidak mengalami ledakan penduduk maupun pertumbuhan penduduk yang lambat. Berbagai



kelebihan di atas menjadi kekuatan bagi Kabupaten Blitar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015. Dimana era keterbukaan terhadap akses ekonomi, perdagangan, dan ketenagakerjaan serta lainnya dibuka secara bebas antar Negara, sehingga setiap Negara bebas keluar masuk dengan mudah bahkan terkesan tanpa ada hambatan untuk menawarkan produk-produk unggulan. Di sektor ketenagakerjaan dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) membuka kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan data tahun 2014 struktur pendidikan penduduk Kabupaten Blitar terdiri dari lulusan SD sebesar 33.4%, SMP 24.53%, Tidak Tamat SD 15.27%, SLTA dan SMK masing-masing sebesar 9.41% dan 8.04, Sarjana sebesar 5.56%, tidak sekolah 2.02% dan Diploma sebesar 1.76%. Struktur pendidikan penduduk yang masih di dominasi oleh pendidikan dasar tidak banyak memberikan kesempatan bagi sebagian besar penduduk tersebut untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal. Berdasarkan data BPS tahun 2015 tidak kurang dari 48 persen penduduk Kabupaten Blitar menggantungkan perekonomiannya di kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan mayoritas berstatus buruh/karyawan yang tentunya tidak menuntut SDM berpendidikan tinggi. Penduduk yang telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi cenderung untuk bekerja atau menerapkan ilmu ke luar wilayah yang lebih menjanjikan kesejahteraannya.

Selain permasalahan struktur pendidikan penduduk yang masih di dominasi pendidikan dasar, Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pula pada permasalahan terkait kemiskinan dan permasalahan sosial yang masih tinggi.

Berbagai upaya untuk menekan jumlah kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar salah satunya melalui sebuah gerakan yang bernama "Gerbangkawentar". Gerbangkawentar merupakan kepanjangan dari Gerakan Bersama Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Blitar. Namun, hasilnya masih belum memuaskan apabila dilihat berdasarkan indikator keluarga miskin yang menerima bantuan pangan. Berdasarkan data diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan pangan sejak tahun 2012-2014 yaitu sejumlah 46.948 keluarga miskin yang menerima bantuan pada tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 46.948 keluarga pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2014 terdapat 68.721 keluarga miskin yang menerima bantuan.



Permasalahan yang tidak kalah penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera diselesaikan adalah adanya *trend* peningkatan jumlah keluarga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan data Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Blitar selama kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan, hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah PMKS yang menerima bantuan. Terdapat 56.739 PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 56.859 PMKS pada tahun selanjutnya serta pada akhir tahun 2014 jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sebanyak 77.550 PMKS.

Peningkatan jumlah PMKS tersebut disebabkan oleh munculnya PMKS-PMKS baru yang jumlahnya lebih banyak daripada yang tertangani, seperti meningkatnya jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014.

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian keluarga pula yang menjadi latar belakang bagi sebagian masyarakat Kabupaten Blitar memilih pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan harapan mampu untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi penyumbang terbesar kedua TKI dari wilayah Jawa Timur setelah Tulungagung.

Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana seperti BLK dan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja khususnya TKI dari Kabupaten Blitar sangat dibutuhkan dalam upaya merubah struktur perekonomian TKI dari sektor non formal ke sektor formal dan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir (*mindset*). Dengan ketersediaan sarana dan prasarana peningkatan kemampuan bagi penduduk diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan laju pengangguran yang sejauh ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Dimana selama kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan yaitu 23.046 orang tahun 2013, 18.673 orang tahun 2014, dan 16.657 orang tahun 2015.

4.1.2. Sosial Budaya, Ketenteraman dan Ketertiban Daerah

Berbicara berkenaan dengan permasalahan sosial erat kaitannya dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat. Hubungan antar masyarakat yang beranekaragam menciptakan suatu interaksi dan kebiasaan yang kemudian dikenal dengan budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat harus bersumber dan terbentuk dari nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan



tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Beberapa dampak sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Blitar yang dapat mengganggu terwujudnya suasana yang kondusif meliputi: lahirnya karakteristik individualis yang mengarah kepada peningkatan penyalahgunaan obat terlarang merupakan salah satu dampak dari adanya arus globalisasi. Di Kabupaten Blitar sendiri telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penyalahgunaan obat terlarang dimana jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014. Jumlah eks psikotik di Kabupaten Blitar meningkat karena maraknya penggunaan narkoba di kalangan siswa usia SD, SMP, dan SMA. Hal ini dapat dilihat dari peserta rehabilitasi yang masih berusia remaja.

Peningkatan angka kriminalitas dimana persentase angka tersebut mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki kecenderungan fluktuasi yaitu 50% tahun 2011, naik menjadi 80% pada tahun 2012, kemudian turun menjadi 40% ditahun 2013 dan naik kembali menjadi 80% tahun 2014. Angka kriminalitas telah menjadi salah satu indikator baik tingkat nasional maupun provinsi dalam mengukur kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Karena angka kriminalitas menjadi salah satu cerminan bagi suatu pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya, kondisi ketenteraman dan ketertiban itu sendiri. Kondusifitas daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, semakin baik perekonomian daerah biasanya memiliki kondisi masyarakat yang kondusif.

Dengan adanya kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proposional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia khususnya bagi Kabupaten Blitar untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di pihak lain, Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pada sebuah kondisi dimana memiliki wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah



rawan bencana. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya informasi tentang masalah bencana alam yang diterima oleh masyarakat. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah informasi tentang bencana yang diterima oleh masyarakat sangat fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah informasi yang diterima sebanyak 44 kali, kemudian tahun 2012 sampai dengan 2014 menurun menjadi 12 kali namun kembali naik secara signifikan pada tahun 2015 sebanyak 33 kali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah Kabupaten Blitar memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.

Disamping bencana alam, ternyata Pemerintah Kabupaten Blitar termasuk dalam kategori rawan bencana kebakaran. Hal ini ditandai dengan banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 dimana secara berurutan jumlah kejadian kebakaran adalah sebagai berikut 17 kali tahun 2011, 12 kali tahun 2012, 11 kali tahun 2013, 34 kali tahun 2014 dan 9 kali di tahun 2015.

4.1.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud meliputi angkutan jalan, perumahan, sumber daya air, sarana jalan, pendidikan, kesehatan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tahun 2015 kondisi infrastruktur Kabupaten Blitar khususnya kondisi jalan masih membutuhkan peningkatan. Hal tersebut dikarenakan belum sepenuhnya jalan Kabupaten yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Blitar dalam keadaan baik. Jika berdasarkan kewenangan panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah, jalan sepanjang 1.383 km berada pada kondisi baik 35%, kondisi sedang 45%, kondisi rusak ringan 15%, dan kondisi rusak berat 5%.

4.1.4. Sumber Daya Manusia

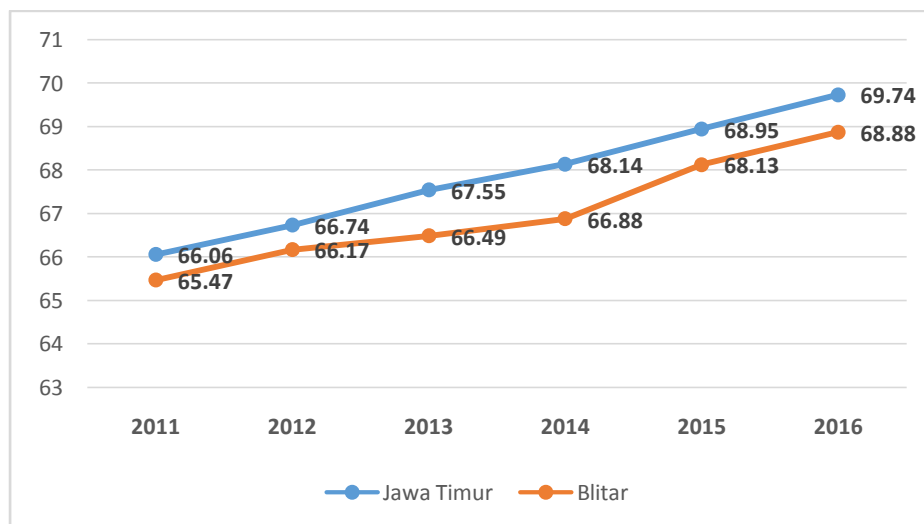
Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembangunan daerah. Keberadaannya menjadi faktor utama bagi terwujudnya Pemerintah Daerah yang memiliki daya saing tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu daerah dapat di kategorikan sebagai daerah maju, berkembang atau terbelakang maka dapat di ukur dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi



dasar pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang disusun oleh beberapa variabel antara lain angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (*Expected Years School/EYS*) dan angka rata-rata lama sekolah (*Mean Years School/MYS*) serta standar hidup layak. Angka IPM akan memberikan gambaran secara komprehensif terhadap tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusianya semakin baik begitu pula sebaliknya.

Secara umum capaian IPM Kabupaten Blitar masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur. Dengan capaian tersebut, di tahun 2016 Kabupaten Blitar menempati peringkat ke 23 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Meskipun demikian, perkembangan capaian IPM sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah menunjukkan *trend* yang positif yaitu selalu mengalami peningkatan.

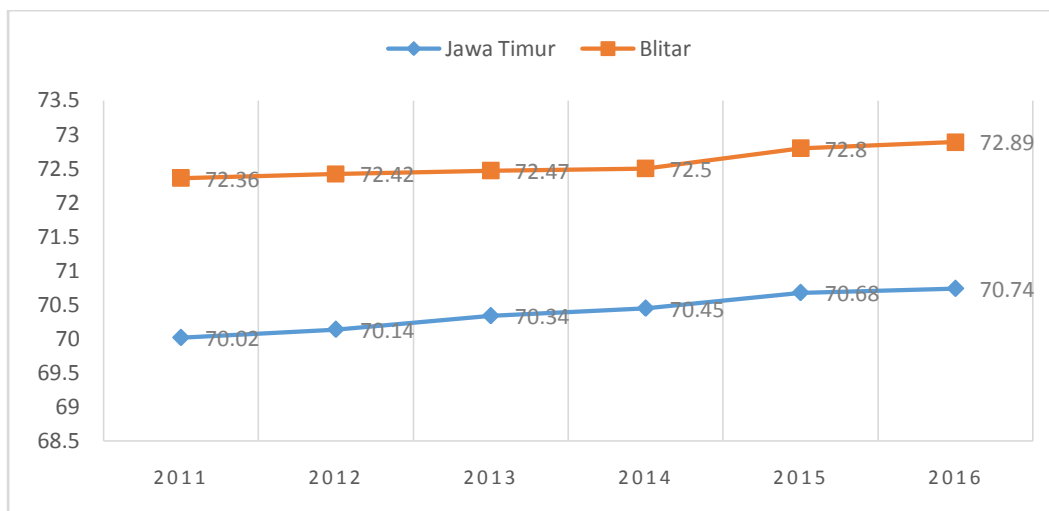
Gambar 4.1
Angka IPM Kabupaten Blitar dan Jawa Timur Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2017

Sementara itu, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar telah menunjukkan capaian yang baik, hal tersebut ditandai dengan capaian angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Blitar yang berada di atas rata-rata capaian AHH Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar sudah baik. Secara terperinci capaian AHH Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2
Angka Harapan Hidup Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2017

Capaian pembangunan IPM Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif dimensi pendidikan ditandai dengan variabel angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang menunjukkan capaian kedua variabel tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Secara terperinci capaian RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah) masyarakat Kabupaten Blitar selama kurun waktu tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Blitar	6,52	6,59	6,67	6,82	7,24	7,25
Prov. Jatim	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14	7,23

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2017

Tabel 4.2
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Blitar	11,03	11,18	11,34	11,37	11,49	11,98
Prov. Jatim	11,49	11,62	11,74	12,17	12,45	12,66

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2017



Sedangkan kondisi pembangunan IPM Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif standar hidup layak yang ditandai oleh variabel pengeluaran per kapita disesuaikan telah menunjukkan capaian yang tidak jauh berbeda dengan capaian IPM berdasarkan dimensi pendidikan. Dimana pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blitar masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Secara terperinci pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blitar selama kurun waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Blitar dan Jawa Timur
Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Blitar	8.726	9.076	9.217	9.245	9.272
Prov. Jatim	9.396	9.797	9.978	10.012	10.383

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

4.1.5. Perekonomian dan Daya Saing

Di masa datang tantangan terhadap perekonomian dan persaingan antar daerah akan semakin tinggi. Maka, dibutuhkan kesiapan bagi setiap daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan daya saing daerah melalui upaya peningkatan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong percepatan iklim investasi antar daerah. Sehingga pada akhirnya akan membuat persaingan dalam peluang investasi antar daerah menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap daerah berupaya secara optimal untuk melakukan promosi terhadap keseluruhan potensi daerah dan berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk percepatan masuknya iklim investasi.

Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negara-negara eropa yang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan ekspor. Terlebih bahwa perekonomian daerah dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dimana perekonomian global dan liberalisasi perdagangan dunia, antara lain diberlakukannya kawasan perdagangan bebas *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010 dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang menjadi dasar pelaksanaan WTO (*World Trade Organization*) serta diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015.



Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar diketahui bahwa jumlah industri kecil menengah (IKM) telah menunjukkan capaian yang positif selama kurun waktu 2011-2015 yaitu 8.700 IKM pada tahun 2011, 8.854 IKM tahun 2012, 8.946 IKM tahun 2013, 18.869 IKM tahun 2014 dan 20.000 IKM tahun 2015. Pertumbuhan jumlah IKM tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mampu untuk mengendalikan penyelenggaraan perekonomian kerakyatan dengan baik dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Sejalan dengan cita-cita dari Pemerintah Pusat yang berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. Perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik dilakukan oleh Kabupaten Blitar dengan menguatkan potensi desa. Hal tersebut ditandai dengan tingginya sumbangan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar khususnya sektor tanaman pangan dan peternakan serta perikanan. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, Sektor industri pengolahan, sektor konstruksi; pertambangan dan penggalian; Informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; *real estate*; jasa keuangan dan asuransi; transportasi dan pengangkutan; jasa lainnya; penyediaan akomodasi dan makan minum; pengadaan listrik dan gas; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa perusahaan; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Di pihak lain, meskipun saat ini sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB Kabupaten Blitar, namun peluang untuk meningkatkan roda perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi wisata masih terbuka lebar. Terlebih dengan banyaknya potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar (40 destinasi wisata tahun 2015) menjadi kekuatan tersendiri bagi Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain jumlah destinasi wisata yang banyak, tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Blitar dimana telah tercatat sebanyak 1.161.075 wisatawan telah berkunjung.

4.1.6. Tata Pemerintahan (*Good Governance*)

Perencanaan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip pelaksanaan *good governance* adalah adanya transparansi, responsifitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Terselenggarakannya *good governance* akan mendorong



kemudahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan birokrasi yang memadai akan dapat mendukung dan mendorong terlaksananya program pembangunan dan pelayanan secara lebih baik. Upaya tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Blitar dihadapkan pada tantangan tentang bagaimana upaya pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi berdasarkan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Pun demikian dengan kemampuan membangun budaya kerja dan pembentukan disiplin, etika dan moral, produktivitas kerja serta kemampuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Dalam aspek kelembagaan, persoalan yang dihadapi adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Di bidang ketatalaksanaan, masalah yang dihadapi saat ini adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tantangan ke depan adalah membangun koordinasi dan sinergisitas yang baik antar pusat dan daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar. Serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap kelembagaan yang efektif dan efisien.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Dinamika Internasional

a. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*)

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri



melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan *non-tarif barriers* seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

b. *Millenium Development Goals (MDG's)* dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau *Millenium Development Goal's* (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicituskannya MDG's.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda pembangunan *Pasca-Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kemajuan pesat telah dibuat demi meraih MDGs. Kemiskinan dunia terus menurun. Semakin banyak anak mengikuti pendidikan dasar. Jumlah kematian anak telah berkurang secara drastis. Akses terhadap air minum yang aman meluas dengan sangat pesat. Pendanaan yang ditujukan untuk memerangi malaria, AIDS, dan TBC telah menyelamatkan jutaan jiwa. Tetapi dengan berakhirnya agenda MDGs pada akhir tahun 2015, para



pemimpin dunia telah menyerukan agenda ambisius baru untuk meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan.

Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030. PBB mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antarpemerintah pasca-2015. Sekretaris-Jenderal PBB telah mengajukan 6 kerangka elemen SDGs: kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia.

SDGs ini merupakan lanjutan dari program yang telah ada dalam MDGs. Tema menarik baru yang dimasukkan dalam SDGs adalah tentang bumi dan manusia serta lingkungan. Tanpa menampik permasalahan paling mengakar sampai hari ini adalah mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, konsep ambisius ini semakin membutuhkan komitmen dari negara-negara untuk saling peduli dan menciptakan sebuah perdamaian.

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan SDG bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

17 pernyataan tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.



3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



4.2.2. Dinamika Nasional

Pada bagian ini dibahas beberapa isu di tingkat nasional, antara lain RPJMN 2015-2019 dan beberapa isu kebijakan sektoral.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki visi (2015-2019) adalah “Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMD juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung pencapaian amanat tersebut.

b. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Makna yang terkandung dari pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang tentang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat untuk diatur dalam susunan pemerintahan. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.



c. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan warna baru bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Selain itu, terdapat juga fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya perubahan urusan dan kewenangan terkait pemerintahan daerah yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka menuntut adanya pemetaan urusan pemerintahan konkuren. Hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren akan mempengaruhi kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka setiap daerah diwajibkan untuk melakukan penyusunan peraturan daerah pembentukan perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada bulan Juni 2016 lalu.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun



2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Selanjutnya perubahan dokumen rencana ini dijadikan dasar untuk penganggaran.

d. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1) Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pada tahun 2012, pembiayaan kesehatan pemerintah (*public health expenditure*) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persendari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaankesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, dan Myanmar. Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Pada tahun 2014, hanya 15 persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan masyarakat.

Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai *universal health coverage* pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah meningkatkan kepesertaan, mengembangkan manfaat jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan penyediaan fasilitas dan ketenagaan.

Sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.



Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok isu kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan.

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung *evidence based planning* yang belum didukung sistem informasi yang kuat; kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal; sinkronisasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.

2) Pendidikan

Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to be*, dan (iv) *learning to live together*. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam tes internasional seperti dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak mengembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD.



Belanja rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaran Pemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terjadi pada semua jenjang pendidikan. Bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum signifikan mengurangi pengeluaran untuk berbagai keperluan sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mengingat bantuan operasional baru mencakup sebagian dari biaya operasional, kenaikan komponen pengeluaran sangat terlihat.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaannya, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun 2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untuk membiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya.

3) Kebudayaan

Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapiantara lain: (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan antara lain: (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih



terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antar daerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada evenbudaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media baik nasional maupun internasional belum optimal.

4) Agama

Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tercermin dari berbagai sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasi kegiatan penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelis taklim untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ, Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dan lain-lain).

Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan *intern* umat beragama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pelayanan kehidupan beragama tersebut berupa regulasi, kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputi antara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah; mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakan rumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci, buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya; meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah; dan pembinaan dan pengembangan lembaga sosial keagamaan.



Berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas ibadah haji telah menunjukkan peningkatan antara lain ditandai oleh Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). Selain itu menurut versi *World Hajj and Umrah Convention* (WHUC) pada tahun 2013 Indonesia juga meraih predikat sebagai penyelenggara haji terbaik dunia.

5) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.

e. Pembangunan Ekonomi

1) Stabilitas moneter

Dalam upaya menjaga stabilitas moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah ini mengandung dua isu strategis, yaitu : (1) menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa, (2) serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Jika dilihat tren inflasi selama lima tahun kebelakang (2010-2014), telah terjadi fluktuasi yang cukup berarti. Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa pada tahun 2010, tekanan inflasi yang dilaporkan



cukup tinggi mencapai 7,0 persen (yoy), melampaui sasaran inflasi 5 ± 1 persen. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,8 persen. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2 persen, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3 persen).

Akan tetapi, lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013 menjadi 8,4 persen, atau berada jauh di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan $4,5\pm 1$ persen. Kenaikan inflasi ini terutama disebabkan dampak gejolak harga pangan domestik serta pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013 baik dampak langsung maupun dampak lanjutan (*second round effect*), dimana kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga. Inflasi perlahan menurun hingga triwulan III tahun 2014. Memasuki triwulan IV tahun 2014, terjadi peningkatan inflasi pada seluruh komponen-komponennya.

Secara tahunan, pada bulan Desember 2014 terjadi inflasi inti sebesar 4,9 persen (yoy), inflasi bergejolak sebesar 10,9 persen (yoy), dan inflasi diatur pemerintah sebesar 17,6 persen (yoy). Kenaikan inflasi 8,4 persen di bulan Desember 2014 didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, cabai merah karena terganggunya pasokan akibat anomali cuaca, dan tarif angkutan dalam kota sebagai dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Inflasi harga bergejolak di bulan Desember meningkat karena masih terbatasnya pasokan bahan pangan di tengah momen Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, isu utama untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi adalah mendorong terciptanya kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi.

Nilai tukar rupiah menguat secara signifikan di tahun 2010. Penguatan rupiah tersebut didukung oleh faktor fundamental yang solid yang tercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang mencatat surplus secara signifikan. Tren nilai tukar rupiah cenderung menguat selama tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 secara rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp. 8.771,0 per dolar AS, menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah pada 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Nilai tukar rupiah melemah 5,9 persen (yoy) selama tahun 2012 ke level Rp. 9.793,0



per dolar AS. Sepanjang tahun 2013, nilai tukar rupiah cukup bergejolak. Tercatat bahwa pada sampai akhir 2013, nilai tukar rupiah mencapai Rp.12.171,0 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipicu sentimen negatif pelaku pasar terhadap rencana pengurangan stimulus moneter AS (*tapering-off*) serta pengaruh defisit transaksi berjalan Indonesia.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah menunjukkan sedikit penguatan pada triwulan I tahun 2014 dan mencapai Rp. 11.361,0 per dolar AS. Namun, memasuki triwulan II, nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mencapai Rp. 11.876,0 per dolar AS dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan global, serta terjadinya defisit neraca perdagangan. Memasuki triwulan III, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga mencapai Rp 12.188,00. Selanjutnya, memasuki triwulan IV tahun 2014, nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi hingga menyentuh level Rp. 12.388,00.

2) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah.



Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antar sektor yang semakin lebar; (2) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; dan (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

3) Peningkatan Pariwisata

Dalam indeks daya saing pariwisata ada tiga ukuran yang dijadikan sebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor ini, yaitu:

- a. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman (*International Tourists Arrivals*), yang selalu meningkat.
- b. Pengeluaran wisman (*International Tourists Receipts*) juga meningkat setiap tahun.
- c. Keterkaitan perjalanan dan pariwisata (*Affinity for Travel and Tourism*) khususnya untuk indikator sikap penduduk terhadap wisatawan asing (*Attitude of Population toward Foreign Visitors*) semakin memburuk.

Dengan demikian isu strategis pembangunan pariwisata adalah “Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.”

f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1) Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim

Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama



berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP (*Total Factor Productivity*) bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola (*governance*), dan stabilitas politik.

Selama ini sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan sumbangan Modal dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah bagaimana meningkatkan dukungannya kepada sektor-sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing.

2) Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang ketiga setelah Brazil dan Kongo, sehingga sering disebut sebagai Negara *megabiodiversity*. Diperkirakan keanekaragaman jenis dunia sekitar 5 – 30 juta jenis flora, fauna, dan mikroba, dan dari sejumlah itu baru 1,78 juta jenis yang sudah teridentifikasi dan diberi nama. Keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah diberi nama baru sekitar 300 ribu jenis. Indonesia memiliki 1,3 persen daratan dunia, namun mengandung lebih dari 17 persen dari total jumlah jenis *species* terestrial di dunia. Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu, tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Sumber daya hayati dapat diolah untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan dan obat, serta jasa lingkungan. Dengan demikian tantangannya adalah mengupayakan agar iptek dapat mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga tantangan yang perlu dihadapi secara nasional adalah dengan meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati.



3) Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 milyar jiwa, sehingga seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, *Global Village*. Kehidupan masyarakat di masa itu semakin menyatu dengan pola hubungan yang semakin erat dan semakin terikat dalam tatanan kehidupan baru yangseolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (*borderless world*).

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global yang demikian? Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu memberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan/pengelola pembangunan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Dukungan IPTEK tersebut dalam bentuk (1) Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern; (2) Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).

4.2.3. Dinamika Regional (Provinsi)

Telaahan dinamika provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan beberapa isu atau kondisi terkini yang ada di Jawa Timur.

a. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Kabupaten Blitar merupakan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730). Secara Administratif Kabupaten Blitar berada diwilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga keberadaannya harus mampu mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perencanaan pembangunan kabupaten/kota harus memperhatikan perencanaan pembangunan provinsi. Untuk itu perumusan isu strategis



Kabupaten Blitar memperhatikan isu-isu strategis dan kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Beberapa isu strategis yang menjadi isu pembangunan 5 (lima) tahun di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, disajikan berikut ini.

1. Menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan kemampuan daya saing Koperasi dan UMKM.
3. Disparitas Wilayah.
4. Infrastruktur.
5. Pengangguran.
6. Energi.
7. Lingkungan Hidup.
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
9. Ketahanan Pangan dan Pertanian.
10. Kemiskinan.
11. Kerjasama Daerah.
12. Komunikasi dan Informatika.
13. Penanggulangan Bencana.

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah:

"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut, ditempuh lima misi yang diberi judul: ***Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik***. Kelima misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang.
4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.



5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.
3. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
4. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD).
5. Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan.
6. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga.
7. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata.
8. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan.
9. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
10. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.
11. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.
12. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
13. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
14. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
15. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.
16. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).
17. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.
18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).
19. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).



20. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.
21. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (*food availability*).
22. Meningkatnya penyerapan pangan (*food utilization*).
23. Meningkatnya akses pangan (*food acces*).
24. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.
25. Meningkatnya kontribusi sektor industri.
26. Meningkatnya kunjungan wisata.
27. Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal.
28. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah.
29. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara.
30. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi.
31. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air.
32. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi.
33. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi.
34. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi.
35. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut.
36. Menurunnya emisi GRK.
37. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang.
38. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
39. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



40. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan.
41. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.
42. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
43. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.
44. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
45. Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan.
46. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama.
47. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.
48. Mekuatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial.
49. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.
50. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.

b. Isu/kondisi Terkini di Jawa Timur

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan". Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang



inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah faktor pertumbuhan UMKM dan Koperasi. Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012).

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

Selain UMKM dan Koperasi sebagai penunjang positifnya isu ekonomi adalah pada bidang ketahanan pangan dan pertanian. Sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48 juta ton. Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Selanjutnya faktor yang menjadi nilai negatif dari isu perekonomian adalah isu pengangguran dan kemiskinan. Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja



yang masih minim. Selain masalah tersebut, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada September 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

2. Infrastruktur

Beberapa permasalahan infrastruktur di Jawa Timur terdiri dari permasalahan transportasi seperti dibutuhkannya penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa. Permasalahan manajemen di bandara, tol, jalan raya, pelabuhan, stasiun, menjadi perhatian khusus untuk segera masuk dalam perencanaan yang terpadu padamasa yang akan datang.



Permasalahan infrastruktur lain yang ada di Jawa Timur adalah mengenai bencana banjir dan kekeringan, serta ketersediaan air bersih. Selain pembangunan infrastruktur kebutuhan air bersih pengembangan sarana infrastruktur PDAM dan sanitasi lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, Lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

3. Lingkungan Hidup

Pembangunan secara berkelanjutan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pemerintah Jawa Timur Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sektor utama yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah.

Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012).



Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.



Tabel 4.4
Telaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
Visi	Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
Misi	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; Bangsa berdaya saing; Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran Makro: <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan manusia dan masyarakat Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> Kependudukan dan keluarga berencana Pendidikan Kesehatan Kesetaraan gender dan pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga. eningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan.



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
	<p>perempuan</p> <p>e. Perlindungan anak</p> <p>f. Pembangunan masyarakat</p> <p>3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:</p> <p>a. Kedaulatan pangan</p> <p>b. Kedaulatan energi</p> <p>c. Maritim dan kelautan</p> <p>d. Pariwisata dan industri manufaktur</p> <p>e. Ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas</p> <p>4. Sasaran Dimensi Pemerataan:</p> <p>a. Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi</p> <p>b. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu</p> <p>5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:</p> <p>a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah</p> <p>6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:</p> <p>a. Politik dan Demokrasi</p> <p>b. Penegakan Hukum</p> <p>c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi</p> <p>d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah</p> <p>e. Pertahanan dan Keamanan</p>	<p>9. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p> <p>10. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan.</p> <p>11. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi.</p> <p>12. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keperahan Kemiskinan.</p> <p>13. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).</p> <p>14. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.</p> <p>15. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi.</p> <p>16. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB).</p> <p>17. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan.</p> <p>18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan).</p> <p>19. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).</p> <p>20. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi.</p> <p>21. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability).</p> <p>22. Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization).</p> <p>23. Meningkatnya akses pangan (food acces).</p> <p>24. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri.</p> <p>25. Meningkatnya kontribusi sektor industri.</p> <p>26. Meningkatnya kunjungan wisata.</p> <p>27. Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal.</p> <p>28. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah.</p> <p>29. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara.</p> <p>30. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi.</p> <p>31. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air,</p>



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<p>peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air.</p> <ol style="list-style-type: none">32. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi.33. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi.34. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi.35. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut.36. Menurunnya emisi GRK.37. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang.38. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.39. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.40. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan.41. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya.42. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.43. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.44. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.45. Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan.46. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama.47. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib.48. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial.49. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.50. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
Strategi	1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: a. Membangun untuk meningkatkan	1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan. 2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
	<p>kualitas hidup manusia dan masyarakat.</p> <p>b. Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.</p> <p>c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.</p> <p>2. Tiga Dimensi Pembangunan:</p> <p>a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.</p> <p>b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas</p> <p>c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan</p> <p>3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:</p> <p>a. Kepastian dan penegakan hukum;</p> <p>b. Keamanan dan ketertiban;</p> <p>c. Politik dan demokrasi; dan</p> <p>d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.</p> <p>4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).</p>	<p>keterampilan tenaga kerja.</p> <p>3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi.</p> <p>4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif.</p> <p>5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.</p> <p>6. Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.</p> <p>7. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.</p> <p>8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>9. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD</p> <p>10. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan</p> <p>11. Meningkatkan minat baca masyarakat</p> <p>12. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas</p> <p>13. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda</p> <p>14. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event</p> <p>15. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan</p> <p>16. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan</p> <p>17. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan</p> <p>18. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita</p> <p>19. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya</p> <p>20. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif</p> <p>21. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu</p> <p>22. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin</p> <p>23. Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan</p> <p>24. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-</p>



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<p>fokus")</p> <ol style="list-style-type: none">25. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan26. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)27. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)28. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin29. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS30. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan31. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan32. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi33. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru34. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan35. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)36. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian37. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir38. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat39. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)40. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi41. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu42. Meningkatkan stok pangan masyarakat43. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan44. Meningkatkan penanganan keamanan pangan45. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan46. Menjaga stabilitas harga pangan47. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<ul style="list-style-type: none">48. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional49. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal50. Meningkatkan pengembangan sektor industri51. Mengembangkan bahan baku substitusi impor52. Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global53. Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal54. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif55. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi56. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu57. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal58. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif59. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi60. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah61. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan62. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat63. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan64. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas65. Meningkatkan pengelolaan air tanah66. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi67. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi68. Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan69. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi70. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut71. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		<ol style="list-style-type: none">72. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah73. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi74. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur75. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur76. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan77. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional78. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten79. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif80. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD81. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya82. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah83. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal84. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid85. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)86. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana87. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)88. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah89. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi90. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi,



Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
		politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban 91. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas 92. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan 93. Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal 94. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM 95. Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM 96. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM



4.2.4. Telaahan RPJMD Daerah Lain dan Kerjasama Antar Daerah

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Telaahan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Tulungagung	2014-2018	<p>Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan. 2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas. 3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain. 5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan. 6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu. <p>Kebijakan umum RPJMD Kabupaten</p>



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			<p>Tulungagung tahun 2014-2018 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Blitar, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.3. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain4. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.5. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tulungagung.6. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Tulungagung melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2	Kota Blitar	2016-2021	<p>Visi: Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional <p>Strategi dan/atau Arah Kebijakan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Blitar, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata.2. Pengembangan Ekonomi Kreatif3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan, dan perhubungan secara memadai dan merata4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas perhubungan secara memadai dan merata



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			6. Pelestarian kawasan / bangunan cagar budaya 7. Pelestarian nilai, tradisi, warisan dan kekayaan budaya serta kesenian lokal
3	Kabupaten Malang	2016-2021	Visi: Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" Misi: 1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum; 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi; 3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; 5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa; 6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat; 7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Strategi RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Blitar, antara lain: a. Meningkatkan koperasi aktif dan pertumbuhan UMKM b. Meningkatkan pendamping usaha ekonomi produktif masyarakat c. Meningkatkan daya saing industri kreatif dengan lapangan kerja d. Mengurangi jumlah penduduk miskin e. Meningkatkan IPM f. Meningkatkan kegiatan lapangan kerja padat karya g. Meningkatkan hasil produksi: Pertanian, Hortikultura, Kehutanan, Peternakan, h. Perkebunan, Kelautan dan Perikanan mempertahankan fungsi jalan dalam kondisi baik i. Meningkatkan jaringan jalan yang



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			terlayani angkutan umum j. Meningkatkan persentase sarana air bersih yang layak k. Menurunkan backlog perumahan l. Meningkatkan kawasan kota dan perdesaan dalam kategori bersih dari sampah m. Meningkatkan ketersediaan air tanah
4	Kabupaten Kediri	2016-2021	Visi: Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional. Misi: a. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. b. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman. d. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. e. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan f. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro. g. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah. h. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko-guru pembangunan ekonomi kerakyatan. i. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha. j. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan. k. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			<ol style="list-style-type: none">1. Membangun infra-struktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.m. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.n. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.o. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.
			Program prioritas: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama2. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan untuk Memperkuat Kemandirian Menuju Swasembada Pangan3. Peningkatan Kesejahteraan Lahir Batin di Masyarakat4. Pendidikan Berkualitas dengan Biaya Murah (Terjangkau)5. Masyarakat Mandiri Dan Berkeadilan Dibidang Kesehatan6. Mengembangkan Kreatifitas, Produktifitas Dan Pendapatan Masyarakat Melalui Kebijakan Ekonomi Kerakyatan7. Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah;8. Pengembangan Koperasi9. Mempermudah Perizinan sebagai Pendorong Investasi dan Dunia Usaha10. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Tertata, Taat Hukum, Tertib Berbasis Kependudukan11. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional12. Pembangunan Infra-struktur Penunjang Percepatan Pembangunan13. Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi14. Pengembangan Lingkungan Hidup yang Seimbang dan Sehat15. Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang menyepakati 7 (tujuh) ruang lingkup kerjasama pembangunan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara kedua daerah dan ditandatangani oleh Bupati Blitar Herry Noegroho dan Bupati Malang Rendra Khresna pada Tahun 2013. Ketujuh ruang lingkup kerjasama tersebut diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, perhubungan, pendidikan, dan pariwisata. Terkait kerjasama di bidang perhubungan, kedua pemerintah daerah menyepakati pelurusan jalan Blitar arah Malang di Kawasan Brongkos Kesamben, di bidang kesehatan, difokuskan pada



masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Blitar Selatan dan Malang Selatan seperti di Kecamatan Wates. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, diharapkan warga Kabupaten Blitar mendapatkan kemudahan jika hendak berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit milik Pemkab. Malang, begitupun sebaliknya. Sedangkan di bidang pariwisata, terutama di beberapa kawasan pantai di Blitar bagian selatan, akses dari Kabupaten Malang akan lebih dimudahkan, sehingga direncanakan jalur masuk ke sejumlah objek wisata pantai tersebut akan ditata kembali. Diharapkan melalui kesepakatan bersama antara kedua daerah, akan tercipta kemajuan pembangunan yang saling menguntungkan.

4.2.5. Dinamika Lokal

a. Telaahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Blitar

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan 20 tahun Kabupaten Blitar. Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blitar memiliki visi:

TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MANDIRI, TANGGUH
DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG
SEJAHTERA, MAKMUR, DAN RELIGIUS.

Untuk mewujudkan Visi dan Agenda Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blitar serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumber daya alam, pelestarian



lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; dan

7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar saat ini memasuki tahap ketiga atau dapat dikatakan sebagai RPJMD ketiga. Tujuan dari tahap ketiga Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025 adalah:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
2. Sejalan dengan keamanan dan ketertiban yang makin mantap yang ditandai dengan peningkatan profesionalisme aparat keamanan yang didukung partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelebagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara makin mampu mendukung pembangunan nasional.
3. Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
4. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya



- kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.
5. Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
 6. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi sebagai bagian dari masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

b. Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Blitar

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **Kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.



Tabel 4.6
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Kebijakan	Strategi
<p>a. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;</p> <p>b. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;</p> <p>c. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten blitar;</p> <p>d. Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;</p> <p>e. Pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;</p> <p>f. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;</p> <p>g. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;</p> <p>h. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;</p> <p>i. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;</p>	<p>(1) Strategi Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang di Kabupaten Blitar, meliputi:</p> <p>a. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya;</p> <p>b. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan di luar PKL; dan</p> <p>c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.</p> <p>(2) Strategi Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, meliputi:</p> <p>a. membangun kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di wilayah Kabupaten;</p> <p>b. meningkatkan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;</p> <p>c. mengembangkan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; serta</p> <p>d. mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di kabupaten.</p> <p>(3) Strategi Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar, meliputi:</p> <p>a. menetapkan pengembangan kawasan agroindustri pada kecamatan potensial;</p> <p>b. mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan pertanian di kabupaten; dan</p> <p>c. meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah.</p> <p>(4) Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial, meliputi:</p> <p>a. mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang berpotensi ;</p> <p>b. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir</p>



Kebijakan	Strategi
<p>j. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;</p> <p>k. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;</p> <p>l. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>m. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan</p> <p>n. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>untuk kawasan pengembangan perikanan ;</p> <p>c. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;</p> <p>d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran untuk menunjang perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten;</p> <p>e. membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan – kecamatan potensial;</p> <p>f. mengembangkan saluran pasar produk agribis yang bermutu untuk meningkatkan penjualan; dan</p> <p>g. membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri Kencana di Kabupaten; dan</p> <p>h. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen.</p> <p>(5) Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, meliputi:</p> <p>a. mengembangkan angkutan transportasi lokal, antar kota dan kabupaten beserta sarana dan prasarananya;</p> <p>b. mengembangkan jalan kolektor primer jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang – Blitar – Tulungagung;</p> <p>c. mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;</p> <p>d. mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di kabupaten yang tidak terletak di jalan kolektor; dan</p> <p>e. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan.</p> <p>(6) Strategi Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu, meliputi:</p> <p>a. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata;</p> <p>b. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang;</p> <p>c. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, industri dan perdagangan;</p> <p>d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya; dan</p> <p>e. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses</p>



Kebijakan	Strategi
	<p>pasar yang kondusif.</p> <p>(7) Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). mengendalikan secara ketat perubahan terhadap kawasan hutan lindung;2). memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;3). meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan4). meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.b. memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;2). mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan3). melestarikan kawasan yang termasuk hulu das dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;2). membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai;3). mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;4). memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian;5). membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan6). menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas Blitar.d. Memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi:<ul style="list-style-type: none">1). menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;2). memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; dan3). meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai objek penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.



Kebijakan	Strategi
	<p>(8) Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi terjadinya bencana, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; danc. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa. <p>(9) Strategi untuk Pengembangan kawasan agroindustri di Kabupaten Blitar sesuai dengan potensi unggulan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">1). membatasi dan mengawasi kegiatan pengembangan pertanian pada kawasan konservasi;2). menjaga kualitas lahan, melalui kegiatan pergiliran budidaya tanaman pertanian ;3). meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui kegiatan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;4). mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya;5). Mengembangkan kegiatan ekstensifikasi melalui peningkatan kelas lahan perkebunan agar menjadi lebih produktif; dan6). menetapkan sentra pengembangan kegiatan pertanian pada masing-masing wilayah.b. Mengembangkan kawasan perikanan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:<ol style="list-style-type: none">1). mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglekok;2). mengembangkan budidaya ikan hias dengan perbaikan pangsa pasar pada jaringan yang lebih luas;3). mengembangkan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang;4). meningkatkan kuantitas hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern;5). memperluas pangsa pasar, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta promosi yang gencar oleh aparat pemerintah maupun masyarakat secara umum;6). meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan7). mengoptimalkan fungsi koperasi nelayan sebagai tulang punggung pemenuhan



Kebijakan	Strategi
	<p>kebutuhan nelayan.</p> <p>c. Mengembangkan kawasan perkebunan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1). meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;2). memperluas pangsa pasar untuk penjualan produk hasil perkebunan yang dibantu oleh pemerintah dalam bentuk promosi;3). mengembangkan kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta;4). meningkatkan kegiatan koperasi usaha yang dapat menunjang perkembangan hasil perkebunan; dan5). menyediakan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan. <p>d. Mengembangkan kawasan peternakan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1). mengembangkan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan ayam ras petelur sebagai salah satu sektor perekonomian yang berkembang di Kecamatan Kademangan;2). mengembangkan industri pengelolaan pakan ternak untuk mendukung adanya pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di Kabupaten Blitar;3). mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri;4). mendorong investor menanamkan modalnya di sektor ini yang didukung lembaga penjamin finansial;5). mengembangkan konsep cluster sentra produksi peternakan (terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak);6). memperkuat cluster sentra produksi peternakan terutama koordinasi antar instansi;7). mengorganisir peternak agar dapat bersaing dengan pasar global;8). mengembangkan bahan baku pakan ternak dari sumber lokal dengan dukungan dari pihak pemerintah;9). mengembangkan kawasan peternakan yang ramah lingkungan;10). menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan peternakan; dan11). menggalakan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk pengembangan kawasan peternakan. <p>(10) Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, dilaksanakan dengan strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif dengan



Kebijakan	Strategi
	<p>memperhatikan <i>linkage</i> yang ada untuk menciptakan paket wisata yang berdaya saing;</p> <ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial;c. menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan wisata;d. menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata;e. mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial;f. mengembang potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dang. menetapkan kawasan wisata. <p>(11) Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan dilaksanakan dengan strategisebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;b. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;d. mengembangkan perumahan terjangkau; dane. mengembangkan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba). <p>(12) Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pariwisata yang lestari dan berkelanjutan;b. menjaga dan melestarikan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dari kerusakan lingkungan; danc. mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan. <p>(13) Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kecamatan Kademangan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1). mendorong investor menanamkan modalnya di Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan;2). Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dibangun dengan menonjolkan nilai-nilai plus yang merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya;3). Kawasan Peternakan Berskala Besar atau



Kebijakan	Strategi
	<p>Kawasan Industri Peternakan dikembangkan dengan konsep cluster industri, yang diperkuat dengan koordinasi antar instansi;</p> <ol style="list-style-type: none">4). meningkatkan efisiensi produksi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dengan menerapkan peternakan terpadu (<i>ecofarming</i>);5). mendorong sentra produksi peternakan untuk mengembangkan industri pakan ternak sendiri; dan6). mendorong sentra produksi peternakan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis telur unggas. <p>b. mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ngelegok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). menyediakan infrastruktur untuk mendukung perkembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ngelegok;2). mengembangkan pemasaran dan jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran; dan3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga. <p>c. mengembangkan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan di Kabupaten Blitar (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto) untuk kegiatan perikanan dan pariwisata dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). meningkatkan kerjasama dalam penyediaan tanah disertai lahan pengganti agar luas hutan tetap;2). menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)3). mengembangkan kegiatan ekonomi yang menunjang keberadaan PPI; dan4). mengembangkan wisata alam pantai di Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto. <p>d. mengembangkan Kawasan Agroindustri di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). memasarkan produk-produk agribis di tempat-tempat yang khusus menjual produk buah bermutu seperti swalayan, supermarket dan lain-lain);2). memfasilitasi promosi produk agrobis yang bermutu;3). mengembangkan rantai pemasaran dan



Kebijakan	Strategi
	<p>jaringan kerjasama antara para pelaku produksi dan pemasaran agribis; dan</p> <ol style="list-style-type: none">4). menyediakan sarana pemasaran berupa terminal atau sub terminal agribisnis yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen. <p>e. mengembangkan kawasan agropolitan di seluruh Kecamatan Kanigoro, dengan strategi pengembangannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agroindustri;2). memperhatikan manajemen sarana dan prasarana produksi melalui ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan mutu; dan3). memperhatikan dan melihat peluang pasar yang cukup potensial, dimana akan diarahkan melalui strategi pemasaran yang tepat melalui strategi produk, promosi, tempat dan harga. <p>f. meningkatkan prasarana jalan dari dan menuju pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi;</p> <ol style="list-style-type: none">1). membuka jalur lalu lintas (trayek) kendaraan umum dari pusat kawasan agroindustri ke kawasan sentra produksi;2). mengembangkan terminal agribisnis di kawasan agroindustri;3). memberikan pinjaman modal kepada kelembagaan petani yang sudah terbentuk dan berfungsi; dan4). memberikan kemudahan bagi investor yang ingin membuka usaha di kawasan agroindustri berupa perizinan, pajak dan lain - lain. <p>g. mengembangkan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;2). meningkatkan pemanfaatan bangunan kuno dan peninggalan sejarah untuk penelitian pendidikan dan sebagai wisata budaya yang perlu dilestarikan; dan3). mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar bangunan kuno dan peninggalan sejarah. <p>h. memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural, dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1). melindungi dan melestarikan desa-desa dan lokasi-lokasi yang memiliki kemurnian tradisi dari budaya luar;2). mengembangkan kawasan wisata harus ditunjang pula dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan3). mempromosikan obyek-obyek wisata di



Kebijakan	Strategi
	<p>Kabupaten Blitar.</p> <ul style="list-style-type: none">i. Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1). meningkatkan pengawasan dan pelarangan fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;2). mengembangkan pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;3). mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; dan4). mengembangkan keanekaragaman hayati kawasan lindung. <p>(14) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; danc. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031

Selain kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana diuraikan di atas, RTRW Kabupaten Blitar memuat rencana program yang meliputi program perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Berikut ini disajikan program perwujudan kawasan strategis Kabupaten Blitar sampai 2031. Namun, mengingat kesamaan periodisasi dengan RPJMD, maka program kawasan strategis difokuskan pada Tahap II (2016-2020) dan 1 Tahun di tahap III yaitu Tahun 2021.



Tabel 4.7
Program Perwujudan Kawasan Strategis

NO.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap I (2011 - 2015)					Tahap II (2016 - 2020)	Tahap III (2021 - 2025)	Tahap IV (2026 - 2031)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi													
	a. Pengamanan kawasan wilayah sungai dan konservasi kawasan hulu sungai	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Disparbudpora, Swasta										
	b. Pelestarian dan pengelolaan DAS brantas secara lintas wilayah	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Disparbudpora										
	c. Pembuatan tanggul pada kawasan DAS brantas, dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Disparbudpora										
	d. Peningkatan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air	Sepanjang DAS Brantas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disparbudpora										
2.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten													
2.1	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi													
	a. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberadaan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kabupaten Blitar.	Kecamatan Kademangan, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Garum	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Peternakan dan Perikanan, Swasta										
	b. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang minapolitan di Kecamatan Nglekok	Kecamatan Nglekok.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Peternakan dan Perikanan, Swasta										
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan agroindustri	Kecamatan Pongkok dan Kecamatan Kanigoro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Peternakan dan Perikanan, Swasta										



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

NO.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
					Tahap I (2011 - 2015)					Tahap II (2016 - 2020)	Tahap III (2021 - 2025)	Tahap IV (2026 - 2031)						
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th						
	d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, meningkatkan aksesibilitas menuju obyek wisata serta peningkatan promosi wisata bagi wisata Candi Penataran, Candi Kencong, Pantai Serang, Pantai Tambakrejo, Pantai Jolosutro.	Wisata Penataran, Candi Kencong, Pantai Serang, Pantai Tambakrejo, Pantai Jolosutro.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan, Swasta														
	e. Peningkatan dan penyediaan akses serta sarana prasarana penunjang kawasan pariwisata Gunung Kelud dan Candi Penataran melalui paket wisata dan promosi	Gunung Kelud Kecamatan Gandusari dan Candi Penataran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan, Swasta														
2.2	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya																	
	a. Zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi;	kawasan Candi Penataran di Desa Penataran Kecamatan Nlegok; Candi Simping di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan; dan Candi Sawentar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Disparbudpora, Swasta														
	b. Pelestarian dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kawasan obyek wisata ritual	Gunung Kelud dan Candi Penataran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Disparbudpora, Swasta														
	c. Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.	Gunung Kelud dan Candi Penataran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Disparbudpora, Swasta														
3.3	Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup																	
	a. Mengadakan kegiatan reboisasi terhadap hutan gundul dengan mengikutsertakan masyarakat.	BKPH Rejotangan, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Kesamben, dan Wlingi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten														



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BLITAR 2016-2021**

NO.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					Tahap I (2011 - 2015)					Tahap II (2016 - 2020)	Tahap III (2021 - 2025)	Tahap IV (2026 - 2031)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	b. Membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan lindung.	BKPH Rejotangan, Lodooyo Barat, Lodooyo Timur, Kesamben, dan Wlingi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten										
	c. Meningkatkan fungsi lindung dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan sumber daya alam lainnya.	BKPH Rejotangan, Lodooyo Barat, Lodooyo Timur, Kesamben, dan Wlingi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten										



c. Telaahan KLHS

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*).

Dengan mempertimbangkan beberapa masukan perbaikan untuk visi-misi, tujuan, arah kebijakan dalam RPJMD, catatan rekomendasi ini yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan rumusan-rumusan dalam RPJMD, baik secara konseptual maupun secara praktis dalam program dan kegiatan. Hal ini terutama dalam bidang pemberdayaan aparatur daerah, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemantapan ekonomi demi memberikan definisi yang lebih terarah pada visi-misi membentuk Kabupaten Blitar yang “berdaya saing”.

Berikut ini disajikan rumusan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.



Tabel 4.8
Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
1	Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian penggunaan lahan	<p>Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;</p> <hr/> <p>Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen RIPPDA yang mengatur pemanfaatan lahan dengan peruntukan pariwisata. • Pengintegrasian antar program dan antar stakeholder • Penyusunan zoning regulation yang mengatur dan mengendalikan pemanfaatan lahan apabila kawasan perdesaan mulai berkembang. • Pengawasan terhadap kesesuaian dokumen tata ruang dengan ijin mendirikan bangunan. • Perencanaan tata kota harus disesuaikan dengan daya tampung dan kemampuan lahan harus tetap bisa diandalkan kelestariannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi yang mengatur peruntukan lahan baik peruntukan kawasan lindung maupun budidaya, pengawasan terhadap pembangunan dengan melakukan pengetatan izin administrasi pembangunan misalnya IMB, pajak dan retribusi. • Pembuatan regulasi untuk pembatasan wilayah yang diperbolehkan adanya pembangunan dan tidak diijinkan adanya pembangunan • Pengembangan wisata berbasis budaya lokal yang positif dan sesuai tatanan sosial, hukum negara dan agama 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang yang memberikan jaminan kemudahan akses terhadap kawasan sekitarnya • Penerapan NSPK (Norma Standar Pedoman dan Kriteria) pelaksanaan tata ruang. • Memperkuat interelasi desa-kota, dengan demikian visi pengembangan Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi pada pusat perkotaan. • Pengendalian perubahan pemanfaatan lahan (terutama pertanian menjadi



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
2	Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah limbah domestik, limbah industri/perusahaan	<p>Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;</p> <p>Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen tentang lingkungan pada kawasan pengembangan pariwisata yang mengatur dampak limbah dari kegiatan pariwisata. • Penyusunan masterplan persampahan • Peningkatan gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk semua wilayah. • Peningkatan ketrampilan pemanfaatan sampah/limbah yang berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengontrolan terhadap penggunaan lahan pada objek wisata dan disekitar objek wisata dengan mempertegas IMB/AMDAL/RKL/RP L • Perlu menambah sarana pembuangan sampah terutama di lokasi wisata. Selain itu perlu mendirikan unit pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu • Pembuatan regulasi terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari objek wisata • Peningkatan kualitas 	Ya	<p>perumahan-permukiman) serta pengendalian perkembangan sektor pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi secara berkala terkait regulasi penataan ruang dan zoning regulation • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan • Dukungan Pemerintah berupa bantuan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan limbah dan pengurangan produksi sampah. 	TPA dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan persampahan sejak hulu hingga hilir.		
3	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik	<p>Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;</p> <p>Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pemerintah kabupaten Blitar;</p> <p>Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintah daerah melalui penerapan prinsip <i>“the right man on the right place”</i>;</p> <p>Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat teknologi informasi untuk masing-masing SKPD. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi daerah Melakukan kerjasama baik dengan pihak swasta maupun institusi/universitas dalam penerapan teknologi informasi yang tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan budaya lokal dan promosidaerah serta dalam pelayanan publik 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pengetahuan masyarakat luas khususnya generasi muda dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna di beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi informasi



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		profesionalisme;				
		Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah;				
		Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;				
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima disegala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;				
		Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan ketrampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;				
		Pengembangan iklim usaha secara sehat serta				



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		<p>melindungi konsumen;</p> <hr/> <p>Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;</p> <hr/> <p>Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <hr/> <p>Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.</p>				
4	Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan Desa/Kelurahan	Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi • Penyuluhan dan peningkatan ketrampilan masyarakat guna 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan kualitas, kapasitas dan SDM masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan dan pembangunan wilayah sehingga mampu berdaya saing dengan wilayah lain. 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kembali kerjasama antar daerah untuk pengembangan wilayah • Penguatan program peningkatan kerjasama dalam pembangunan



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;		pengembangan ekonomi lokal masyarakat.		wilayah
5	Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola)	Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan regulasi oleh badan penanaman modal sehingga investasi yang dilakukan tepat sasaran. • Peningkatan peran masyarakat/investor lokal dalam partisipasi pembangunan kota. • Pengelolaan budaya lokal agar menjadi lebih bernilai jual • Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi • Program yang tepat sasaran dan merata bagi usaha-usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas produksi lokal dan sosialisasi investasi lokal sehingga perputaran perekonomian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Blitar. • Peningkatkan kualitas, kapasitas dan SDM masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan perekonomian di daerahnya. 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah. • Program peningkatan iklim Investasi dan Realisasi investasi dengan memperkuat perlindungan terhadap pengembangan industri lokal dan keberlanjutan lingkungan



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			<ul style="list-style-type: none"> mikro yang berasal dari masyarakat termasuk home industry Pengaktifan kembali UMKM yang pasif yang terdapat di Kabupaten Blitar. Penyuluhan dan peningkatan ketrampilan masyarakat guna pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi dan UMKM. 			<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian jenis aktivitas pengembangan investasi dan mengutamakan potensi ekonomi local. Peninjauan kembali kerjasama antar daerah untuk pengembangan ekonomi lokal Penguatan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
6	Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil pertanian.	Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pertanian dan peningkatan penggunaan teknologi pertanian sehingga investasi dilakukan pada sektor pertanian bukan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian. Pengintegrasian serta Implementasi antar program dan kerjasama antar stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi pertanian yang baru dan modern sehingga dapat meningkatkan hasil panen sehingga petani dapat meningkatkan kesejahteraannya dan tidak beralih mata pencahariannya. Pengembangan kewirausahaan dengan mengolah hasil panen para 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah sekitarnya. Perbaikan dan perawatan pasar tradisional guna peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian lokal. Manajemen yang berkualitas



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pertumbuhan ekonomi • Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian • Penyuluhan dari dinas pertanian terkait metode dan teknologi pertanian yang efektif dan efisien. • Penguatan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai lembaga penggerak dalam sektor pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • petani agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. • Penyuluhan dan pembinaan usaha kecil dan menengah terutama terkait dengan pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan kualitas produk. • Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kemudahan perijinan pendirian Agroindustri hulu (produksi input usaha tani) dan agroindustri hilir (pengolahan hasil pertanian) • Perlindungan terhadap harga jual hasil panen sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. 		<ul style="list-style-type: none"> • untuk penggunaan lahan-lahan yang akan direncanakan ditetapkan sebagai area LP2B • Memperkuat interelasi desa-kota, dengan demikian visi pengembangan Kabupaten Blitar tidak hanya berorientasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, tetapi juga untuk mewadahi perkembangan aktivitas ekonomi berbasis pertanian di daerah sekitarnya. • Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan desa-kota.
7	Meningkatnya penggunaan	Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan pusat dan sub pusat yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi antara pengembangan 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi sarana



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
	kendaraan pribadi sebagai akibat menurunnya kualitas serta sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan.	<p>semua bidang;</p> <hr/> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima disegala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;</p> <hr/> <p>Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam</p> <hr/> <p>Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah</p>	<p>memiliki akses yang baik dan tersedianya angkutan umum yang memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum • Memperlebar rumaja jalan pada jalan-jalan yang sudah tidak dapat menampung kendaraan dan merencanakan rekayasa lalu lintas • Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi publik • Pengintegrasian dan pembentukan linkage sistem antar wilayah pusat kegiatan dengan lokasi terminal atau sarana transportasi publik. • Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem transportasi publik • Perbaikan sistem transportasi umum dan perbaikan fisik transportasi umum 	<p>kawasan dan pengembangan infrastruktur jalan dengan sarana transportasi publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kembali pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk meratakan kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, serta mengimbangi pemusatan perkembangan pariwisata daerah. 		<p>transportasi berupa terminal dan perbaikan guna peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan manajemen lalu lintas dan jalur kendaraan umum dengan jangkauan akses yang terintegrasi dengan pusat kegiatan. • Pengaturan sistem transportasi umum yang efektif dan efisien.



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
			sehingga masyarakat tertarik untuk beralih ke moda transportasi umum.			
8	Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai.	Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyuluhan ketrampilan kepada tenaga medis/kesehatan dari dinas terkait • Peningkatan pelatihan kepada tenaga medis/kesehatan • Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai • Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dengan jangkauan pelayanan kesehatan semakin diperluas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penambahan sarana prasarana pendukung kesehatan 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga kesehatan pada wilayah terkecil yakni perdesa dengan sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung dan memadai.
9	Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik)	Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang berkompeten • Peningkatan penyuluhan ketrampilan kepada tenaga pendidik dari dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan program wajib belajar 12 Tahun. • Penguatan peran lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal 	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik yang didukung secara penuh oleh Dinas Pendidikan. • Penambahan



No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rumusan Program Pembangunan yang Berdampak Negatif terhadap Isu Strategis	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif		RENSTRA SKPD (Ya/Tidak)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
		kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional dalam era global; <hr/> Pengembangan sektor pertanian, koperasi, UMKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing; <hr/> Fasilitasi pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem informasi desa; <hr/> Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelatihan kepada tenaga pendidik• Penyediaan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang memadai			sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar



4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Blitar 2016-2021

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Blitar, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2016-2021.

a. Peningkatan daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi

Dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan kecenderungan melambat. Perlambatan perekonomian yang terjadi di tahun 2013 merupakan dampak dari pergerakan perekonomian nasional yang pada tahun itu juga mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh pencabutan sebagian subsidi harga BBM pada pertengahan tahun. Dari capaian terakhir laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 serta dengan melihat trend capaiannya, dapat diprediksi bahwa target akhir pertumbuhan ekonomi sebesar 6,97 persen sulit untuk diwujudkan.

Secara umum tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negara-negara eropa yang berakibat pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penguatan daya saing perekonomian adalah daya saing perekonomian akan semakin kuat oleh terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.



b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai

Infrastruktur wilayah merupakan tulang punggung sekaligus berfungsi menjadi pendukung pembangunan suatu daerah. Berbagai aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah tentu saja membutuhkan dukungan atau ketersediaan infrastruktur yang memadai, antara lain untuk perekonomian, social, budaya dan pemerintahan.

Pembangunan atau pengembangan infrastuktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan agar mampu mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Lebih khusus lagi, infrastruktur tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang berhak diperoleh oleh masyarakat. Berbagai pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain meliputi penyediaan jalan dan jembatan, angkutan jalan, perumahan, sumber daya air, pendidikan, kesehatan, energi dan ketenagalistrikan, pos dan telekomunikasi, sanitasi termasuk jaringan drainase dan sistem persampahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan

Keadilan dan kesejahteraan akan menimbulkan masyarakat yang aman dan nyaman. Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Kabupaten Blitar walaupun bukan termasuk dalam kawasan yang dikhawatirkan konflik sosial yang sesuai tertuang pada RPJMD Provinsi Jatim, namun kondisi keamanan dan ketertiban tetap menjadi perhatian. Kondisi keamanan dan kondusifitas dalam berpolitik, mematuhi aspek hukum, dan demokrasi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Indikator yang menitikberatkan pada kemajuan demokrasi, penurunan kriminalitas, dan peningkatan pengamalan pancasila menjadi isu yang paling mempengaruhi isu keamanan dan ketertiban. Hal ini tentu saja perlu dibarengi dengan penerapan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari.



d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kesejahteraan masyarakat memiliki banyak komponen diantaranya menyangkut kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tiga komponen tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 66,49, sehingga mendudukkan Kabupaten Blitar pada urutan ke-23 dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih perlu berupaya meningkatkan pembangunan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.

1) Pendidikan

Komponen pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan komponen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan pendidikan diharapkan mampu dalam mencapai pemerataan kesempatan memperolehnya bagi seluruh penduduk.

Isu bidang pendidikan memiliki beberapa ukuran indikator kinerja. Diantaranya adalah indikator APM, APK dan APS. Kabupaten Blitar pada kurun waktu lima tahun terakhir angka indikator APM, APK, dan APS cenderung naik turun karena sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa/mutasi siswa disamping pola pikir orang tua yang lebih senang menyekolahkan anak ke wilayah kota dengan alasan gengsi, meski secara kualitas sekolah kabupaten tidak kalah. Untuk rasio jumlah guru belum sepenuhnya terpenuhi karena untuk jenjang SD masih kekurangan guru kelas sedang jenjang pendidikan menengah kelebihan guru pelajaran. Sehingga dapat disimpulkan secara umum permasalahan terutama pendidikan di Kabupaten Blitar adalah pemerataan guru dan peningkatan angka partisipasi.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah digunakan sebagai salah satu variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar, selaras dengan pembangunan



pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global.

2) Kesehatan

Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang kedua yakni bidang kesehatan. RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai isu kesehatan dan gizi. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Derajat kesehatan di Kabupaten Blitar mempunyai 45 indikator. Derajat kesehatan di Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami perbaikan. Terdapat banyak indikator dalam pencapaian derajat kesehatan, seperti yang direncanakan maka terdapat indikator mencapai target yang ditetapkan dan beberapa indikator lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satu indikator diantaranya persentase balita gizi buruk dari target maksimal sebesar 0,1% dari jumlah Balita, telah dicapai sebesar 0,08% pada tahun 2014 dan pada pertengahan tahun 2015 sebesar 0,06%, persentasenya menurun dari tahun 2011–2015, hal ini menunjukkan bahwa status gizi Balita semakin meningkat.

Banyaknya indikator isu kesehatan membuat bidang ini menjadi perhatian serius untuk direncanakan secara matang. Isu kesehatan menjadi isu pendukung dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu 45 indikator kesehatan harus dicapai dalam nilai yang baik dengan pemenuhan melebihi target yang telah dibuat.

3) Ekonomi

Indikator dari Komponen Indeks Pembangunan Manusia yang ketiga adalah bidang Ekonomi. Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir dalam target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan memang tidak pernah tercapai. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten Blitar hanya berkisar 5% dan tidak pernah mencapai target yang tiap tahun selalu meningkat. Laju inflasi yang terjadi juga



cenderung fluktuatif dari angka 3,62% pada tahun 2011 dan merosot pada angka 1,71 di tahun 2015.

Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator bidang ekonomi salah satunya adalah pengaruh ekonomi nasional dan internasional, maka pengamanan dan perhatian terhadap ekonomi daerah menjadi tulang punggung untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu ekonomi dipandang menjadi salah satu indikator yang paling mempengaruhi dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain IPM, salah satu indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. AHH merupakan salah satu variabel dari indeks kesehatan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM, indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia. Tingginya AHH merupakan salah satu representasi dari tingginya kualitas hidup masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Secara umum, angka yang ditargetkan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2011-2014 tidak dapat dicapai. Namun, kecenderungan capaian selama pelaksanaan periode RPJMD dapat dikatakan lebih agresif dibanding kecenderungan target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, isu kesejahteraan yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial ini menjadi penting untuk diperhatikan. Alat ukur kesejahteraan mengharuskan banyak indikator pendukung demi tercapainya validitas kesejahteraan yang lebih baik. Konsep kesejahteraan mengindikasikan pada bidang yang lain, jadi jika ingin mendapatkan indikator kesejahteraan dengan nilai yang baik dukungan isu strategis yang lain harus baik.

4) Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia yang memperhatikan disparitas gender menjadi salah satu prioritas Nasional. Hal ini sejalan dengan penetapan 17 indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2015 yang menempatkan Pencapaian Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Perempuan menjadi tujuan kelima. Strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) terus digiatkan. Strategi tersebut dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.



Salah satu cara untuk mengukur adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Development Index* (GDI). Hasil penghitungan menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2015 sebesar 92,96, menduduki peringkat ke-13, lebih tinggi dari capaian Jawa Timur (91,07) dan capaian Nasional (91,03). Dalam lima tahun terakhir, angka IPG Kabupaten Blitar menunjukkan tren peningkatan.

Sementara itu, untuk mengetahui peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM). Capaian Angka IDG Kabupaten Blitar di Tahun 2015 sebesar 75,08 (posisi ke-6 Jawa Timur) jauh lebih tinggi dari angka Jawa Timur (68,41). Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,34 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu 75,42.

Trend IPG Kabupaten Blitar yang terus meningkat menggambarkan capaian perempuan dan laki-laki dalam pembangunan manusia secara umum terus membaik. Sementara, trend IDG yang fluktuatif menggambarkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Blitar masih membutuhkan perhatian yang lebih.

Sebagai bentuk dari partisipasi pemerintah daerah terhadap deklarasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) maka peningkatan kesetaraan gender harus menjadi salah satu muatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Karenanya berbagai regulasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender (PUG) yang telah diterbitkan pemerintah dapat dijadikan sebagai pedoman.

e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah ujung tombak pelayanan publik. Seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan sulit yang membutuhkan paduan intelegensia yang tinggi, pengalaman panjang dan kesahajaan untuk mengambil keputusan. Oleh karena tugas yang maha berat tersebut, seyogyanya PNS adalah orang-orang terbaik di eranya dan memiliki jiwa pengabdian kepada negara.



Pemerintah Kabupaten Blitar memahami betul bahwa bahan utama pelayanan publik yang prima terletak pada kualitas SDMnya. Sayangnya kondisi kualitas SDM saat ini belum mencerminkan hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi ada beberapa, antara lain belum memadainya kompetensi aparatur, masih rendahnya disiplin kerja aparatur, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung, koordinasi antar instansi terkait belum terlaksana secara optimal, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan masih banyaknya pejabat eselon yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.

Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penataan birokrasi yang dibarengi dengan pelayanan publik yang prima dan transparan akan memberikan dampak positif pada masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut, penegakan hukum secara konsistendiharapkan dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

f. Pengembangan Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Perkembangan koperasi di Kabupaten Blitar saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Pada periode 2011 sampai 2016, persentase koperasi aktif mengalami fluktuasi, namun 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Tahun 2016 menunjukkan koperasi aktif sebesar 56,21 persen, yang mengalami peningkatan dari angka 40 persen pada tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Hal ini mengingat baru sekitar 56,21 persen dari koperasi yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) pada tahun 2016.

Selain perkembangan yang positif dari koperasi, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) Kabupaten Blitar beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2011 tercatat 18.644 unit dan terus mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 254.187 unit pada tahun 2016. Kondisi ini masih perlu terus ditingkatkan, sehingga usaha



mikro semakin banyak. Demikian juga usaha mikro yang sudah berkembang dapat meningkat menjadi usaha kecil.

g. Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan kegiatan pariwisata yang baik memerlukan kesiapan setiap elemen dari produk wisata yaitu aksesibilitas, daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas serta amenitas wisata. Keterpaduan unsur-unsur pembangunan kegiatan wisata ini akan mengakibatkan semakin tingginya potensi serta peluang terciptanya kegiatan pariwisata sebagai unggulan pembangunan suatu wilayah. Tanpa dukungan yang memadai dari setiap unsur tersebut, keunggulan komparatif dari suatu daya tarik wisata akan menjadi sangat minim dan mengakibatkan terbatasnya peluang daerah tersebut untuk mampu mempertahankan pengembangan pariwisata di daerahnya.

Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi kepariwisataannya. Potensi kepariwisataannya antara lain daya tarik wisata budaya yang meliputi wisata candi, arca kuno, serta event kebudayaan. Potensi yang kedua antara lain adalah daya tarik wisata alam. Dua potensi kepariwisataan ini perlu dikembangkan serta diinovasikan.

Potensi pengembangan wisata budaya yang ada di Kabupaten Blitar, selama ini mempunyai faktor penghambat seperti: akses, infrastruktur, keamanan, dan kelayakan benda cagar budaya itu sendiri. Beberapa permasalahan dari faktor penghambat tersebut harus diselesaikan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan. Even budaya yang merupakan bagian dari wisata budaya yang merupakan potensi kedaerahan harus juga di kembangkan secara inovasi agar daya tarik wisatawan yang hadir dalam event kebudayaan tersebut semakin meningkat.

Salah satu keuntungan letak Kabupaten Blitar yang berbatasan langsung dengan samudera adalah memiliki puluhan pantai yang eksotis dan menantang dengan jumlah lebih dari 26 pantai terhampar di daerah ini. Namun dari kesemua pantai dan potensi wisata alam yang ada permasalahan utamanya adalah infrastruktur yang tersedia masih minim.

Dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata maka dibutuhkan strategi pengembangan kepariwisataan. Strategi yang pertama adalah pengembangan produk wisata. Pengertian dari produk wisata disini adalah segala fasilitas atau kegiatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisatanya. Produk wisata tersebut, antara lain meliputi objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, amenitas (akomodasi, restoran atau rumah makan), dan aksesibilitas (transportasi). Strategi yang kedua adalah pengembangan prasarana. Pengembangan sarana dan



prasarana pariwisata Kabupaten Blitar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi suatu objek dan daya tarik wisata. Pemenuhan kebutuhan akan prasarana pariwisata meliputi penyediaan jaringan jalan, air bersih, listrik, telepon dan lainnya.

Strategi yang ketiga adalah pengembangan usaha atau investasi. Hal terpenting dalam pengembangan investasi pariwisata di Kabupaten Blitar, yaitu potensi pasar wisatawan, adanya akses jalan yang baik berupa jalan provinsi, serta sikap masyarakat yang terbuka dan *fairness* dengan investor luar daerah.

h. Pengembangan usaha berbasis pertanian dalam arti luas

Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan Kabupaten Blitar banyak dipengaruhi oleh aktivitas berbasis pertanian dalam arti luas. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta kelautan dan perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Blitar.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 31.725 hektar. Dari kawasan inilah sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan di sektor pertanian masih memegang peran utama tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Blitar. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, potensi pertanian Kabupaten Blitar dikenal unggul. Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan mencapai 19,9 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk kegiatan perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Dominasi sektor pertanian ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar yang selalu tercatat di atas 30 persen setiap tahunnya. Di tahun 2015, kategori tersebut menyumbang 36,38 persen dari total PDRB. Disamping padi dan jagung yang merupakan komoditas pertanian tanaman pangan unggulan, komoditas unggulan lain baik perkebunan maupun hortikultura yang dihasilkan di Kabupaten Blitar adalah Rambutan, Nanas, Teh, Cengkeh, dan Kopi.

Di sektor peternakan, produksi telur unggas Kabupaten Blitar konsisten menyumbang hampir sepertiga produksi telur Jawa Timur. Pada tahun 2012 sumbangan produksi telur Kabupaten Blitar terhadap produksi Jawa Timur sebesar 33,54 persen, tahun berikutnya meningkat menjadi 37,08 persen, dan pada tahun 2014 sebesar 27,83 persen (Data Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 2015). Besarnya volume produksi telur di Kabupaten Blitar ini tidak saja menguntungkan para pengusaha/produsen,



melainkan juga dinikmati pula oleh masyarakat pada umumnya, pekerja, dan secara tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui perolehan PAD dan peranannya dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Blitar. Disamping telur yang berasal dari ayam ras, cukup banyak pula telur itik yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Blitar. Produk lain yang dihasilkan dari sektor perternakan ini adalah daging ayam dan susu.

Disamping sektor pertanian, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar baik perikanan laut (tangkap) maupun perikanan darat/budidaya. Potensi perikanan laut sangat menjanjikan karena Kabupaten Blitar langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia di bagian Selatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Blitar sejak beberapa tahun belakangan secara intensif mengembangkan sarana dan prasarana perikanan khususnya di Pantai Tambakrejo, guna meningkatkan produksi perikanan laut tersebut. Pada sektor perikanan darat, khususnya budidaya ikan hias, Kabupaten Blitar terkenal dengan komoditas ikan koi dengan basis budidaya ikan koi di Kecamatan Nglegok yang telah diakui secara nasional sebagai salah satu sentra ikan koi berkualitas di Indonesia. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi tambak udang.

i. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah

Kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diciptakan. *Public Private Partnership* merupakan salah satu strategi penguatan sektor perekonomian. Bentuk kerjasama pemerintah dan dunia usaha salah satunya adalah dalam hal investasi. Berdasarkan data realisasi investasi daerah tahun 2010-2012 terlihat bahwa sebagian besar investasi di Kabupaten Blitar adalah dibidang perdagangan yaitu berupa ijin usaha perdagangan, disusul dengan bidang perindustrian dan jasa konstruksi. Target investasi bidang-bidang tersebut harus dinaikkan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Adanya ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah bergantung pada tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan karena berkenaan dengan infrastruktur dasar yang berpengaruh pada kegiatan investasi. Selain itu pada level mikro, iklim investasi dipengaruhi oleh fasilitas keamanan, ketertiban wilayah, kemudahan dalam pengurusan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Dunia usaha yang saat ini dikembangkan di daerah, memang harus bersiap untuk menghadapi persaingan global. Peran serta hubungan kelembagaan antar pemerintah serta pejabat pemerintah untuk



pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, dan kemudahan dalam pengembangan usaha ekonomi daerah harus dilakukan secara bersama. Dukungan akses, infrastruktur, serta kemudahan melakukan perizinan akan menjadi penentu kebijakan pemerintah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat pada tiap daerah.

Selain pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta/dunia usaha/masyarakat, pembangunan Blitar juga membuka peluang kerjasama pemerintah dengan pemerintah baik lingkup regional, nasional maupun internasional. Peluang kerjasama tersebut diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

j. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa

Menyeleraskan semangat lahirnya Undang-Undang Desa dalam konteks desa yang lebih implementatif terutama dalam hal pengelolaan dana dan perencanaan mengharuskan pemerintah desa dapat menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan jelas dengan program kerja yang terarah. Namun, penerapan prinsip tersebut membutuhkan kesiapan perangkat desa dan kelembagaan desa serta penetapan *key performance indicator* (KPI). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan KPI wajib diterapkan dalam rangka penyaluran Dana Desa agar seluruh kegiatan pemerintah desa memiliki *output* dan *outcome* yang optimal.

Selain hal tersebut juga membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kapasitas pengelola Dana Desa harus memadai agar dalam mengelola Dana Desa tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Perangkat desa harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis di bidang pemerintahan, administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan perencanaan. Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan, maka publikasi APBDes juga perlu dilakukan.

Pembangunan desa tidak hanya membutuhkan penataan kelembagaan dan aparatur, namun juga konsep pengembangan wilayah atau kawasan pedesaan. Pengembangan kawasan perdesaan disesuaikan dengan potensi yang memiliki kesamaan maupun yang saling melengkapi yang bersifat lintas desa. Strategi pengembangannya adalah membangun kawasan peternakan skala besar atau kawasan industri peternakan, meningkatkan pertanian agribisnis di wilayah Blitar bagian utara, mengembangkan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar bagian selatan. Saat ini telah dilaksanakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kanigoro dan kawasan Minapolitan di



Ngelgok. Wilayah lain yang potensial untuk dikembangkan dalam konsep kawasan adalah kawasan peternakan ayam di Kademangan, Ponggok dan Srengat. Kawasan industri makanan olahan di Kademangan, kawasan peternakan sapi perah di Wlingi dan Gandusari.